

# **TESIS**

**PENGARUH BELANJA PEMERINTAH, NILAI TUKAR, SUKU  
BUNGA, DAN DEFISIT ANGGARAN TERHADAP UTANG  
LUAR NEGERI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA**

**THE EFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURE,  
EXCHANGE RATE, INTEREST RATE, AND BUDGET  
DEFICIT ON FOREIGN DEBT AND INDONESIA'S  
ECONOMIC GROWTH**

**MUH. ZULFI QADRI**



**PROGRAM MAGISTER  
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2022**

# **TESIS**

**PENGARUH BELANJA PEMERINTAH, NILAI TUKAR, SUKU  
BUNGA, DAN DEFISIT ANGGARAN TERHADAP UTANG  
LUAR NEGERI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA**

**THE EFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURE,  
EXCHANGE RATE, INTEREST RATE, AND BUDGET  
DEFICIT ON FOREIGN DEBT AND INDONESIA'S  
ECONOMIC GROWTH**

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh:

MUH ZULFI QADRI

A032192001



kepada

**PROGRAM MAGISTER  
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2022**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PENGARUH BELANJA PEMERINTAH, NILAI TUKAR, SUKU BUNGA DAN  
DEFISIT ANGGARAN TERHADAP UTANG LUAR NEGERI DAN  
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

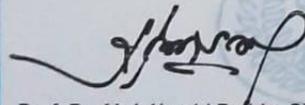
**MUH. ZULFI QADRI  
A032192001**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister **EKONOMI PERENCANAAN DAN  
PEMBANGUNAN** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 15 AGUSTUS 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

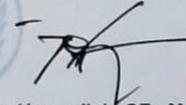
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

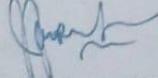


**Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, SE., MA.**  
NIP. 19590306 198503 1 002



**Dr. Hamrullah, SE., M.Si.**  
NIP. 19681221 199512 1 001

Ketua Program Studi  
Magister Perencanaan dan  
Pembangunan



**Dr. Indraswati Abdireviane, SE., MA., CWM®**  
NIP. 19651012 199903 2 001



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

**Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.**  
NIP. 19640205 198810 1 001

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUH. ZULFI QADRI**

NIM : A032192001

Program Studi : Magister Ekonomi Perencanaan  
dan Pembangunan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul : **Pengaruh Belanja Pemerintah, Nilai Tukar, Suku Bunga, Defisit Anggaran terhadap Utang Luar Negeri dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia** Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 24 AGUSTUS 2022

Yang menyatakan,



**MUH. ZULFI QADRI**

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Ekonomi (M.Si.) pada Program Pendidikan Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, S.E., MA. dan Bapak Dr. Hamrullah, S.E., M.Si. sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu beserta saudara-saudarah peneliti atas bantuan, nasihat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian tesis ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-NYA atas bantuan yang diberikan hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, ..... 2022



MUH. ZULFI QADRI

## **ABSTRAK**

**Pengaruh Belanja Pemerintah, Nilai Tukar, Suku Bunga, dan Defisit Anggaran Terhadap Utang Luar Negeri Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**

Muh Zulfi Qadri

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengukur dan menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung melalui utang pemerintah dan utang swasta Indonesia, 2) untuk mengukur dan menganalisis pengaruh nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung melalui utang pemerintah dan utang swasta Indonesia, 3) untuk mengukur dan menganalisis pengaruh suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung melalui utang pemerintah dan utang swasta Indonesia, dan 4) untuk mengukur dan menganalisis pengaruh defisit anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung melalui utang pemerintah dan utang swasta Indonesia. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian pustaka. Analisis data dilakukan dengan uji regresi persamaan simultan yang diestimasi menurut koefisien reduced form. Hasil penelitian: 1) Belanja pemerintah berpengaruh positif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika belanja pemerintah bertambah maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat, 2) Nilai tukar berpengaruh positif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika nilai tukar mengalami peningkatan secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 3) Suku bunga berpengaruh negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika suku bunga meningkat, pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya, dan 4) Defisit anggaran secara langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang berarti jika defisit anggaran meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Defisit anggaran secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang berarti jika defisit anggaran melalui utang pemerintah dan utang swasta mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi akan menurun.

**Kata kunci:** Belanja Pemerintah, Nilai Tukar, Suku Bunga, Defisit Anggaran, Utang Luar Negeri, Pertumbuhan Ekonomi

## **ABSTRACT**

The Effect of Government Expenditure, Exchange Rate, Interest Rate, and Budget Deficit on Foreign Debt and Indonesia's Economic Growth

Muh Zulfi Qadri

This study aims: 1) to measure and analyze the effect of government spending on Indonesia's economic growth, directly or indirectly through Indonesian government debt and private debt, 2) to measure and analyze the effect of the exchange rate on Indonesia's economic growth, directly or indirectly through Indonesian government debt and private debt, 3) to measure and analyze the effect of interest rates on Indonesia's economic growth, directly or indirectly through Indonesian government debt and private debt, and 4) to measure and analyze the effect of the budget deficit on Indonesia's economic growth, directly or indirectly through Indonesian government debt and private debt. Data collection in this study was carried out by library research. Data analysis was performed by simultaneous equation regression test which was estimated according to the reduced form coefficient. The results of the study: 1) Government spending has a positive effect, either directly or indirectly, on Indonesia's economic growth. If government spending increases, economic growth will also increase. 2) The exchange rate has a positive effect, either directly or indirectly, on Indonesia's economic growth. If the exchange rate increases, it will directly and indirectly increase economic growth, 3) Interest rates have a negative effect, either directly or indirectly, on Indonesia's economic growth. If interest rates increase, economic growth will decrease, and vice versa, and 4) The budget deficit directly has a positive effect on economic growth, which means that if the budget deficit increases, economic growth will also increase. The budget deficit indirectly has a negative effect on economic growth, which means that if the budget deficit through government debt and private debt increases, economic growth will decline.

Keywords: Government Expenditure, Exchange Rate, Interest Rate, Budget Deficit, Foreign Debt, Economic Growth

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Grand Theory.....	13
2.2 Utang Luar Negeri .....	17
2.3 Belanja Pemerintah .....	25
2.4 Nilai Tukar .....	30
2.5 Suku Bunga .....	31
2.6 Defisit Anggaran .....	31
2.7 Pertumbuhan Ekonomi.....	32
2.8 Hubungan Antar Variabel .....	34
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS</b> .....	<b>41</b>
3.1 Kerangka Konseptual .....	41
3.2 Hipotesis .....	46
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b> .....	<b>47</b>
4.1 Pendekatan Penelitian .....	47
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
4.3 Jenis dan Sumber Data .....	47

4.4	Teknik Pengumpulan Data .....	48
4.5	Definisi Operasional Variabel .....	48
4.6	Teknik Analisis Data .....	50
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
5.1	Deskripsi Data .....	53
5.2	Deskripsi Hasil Penelitian .....	55
5.3	Pembahasan .....	61
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
6.1	Kesimpulan .....	74
6.2	Implikasi .....	74
6.3	Keterbatasan .....	74
6.4	Saran .....	74
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
5.1	Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen..	55
5.2	Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Variabel Independen ke Variabel Dependen .....	60

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>		<b>Halaman</b>
1.1	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	2
1.2	Grafik Utang Luar Negeri Indonesia .....	4
1.3	Grafik Nilai Tukar Terhadap Dolar .....	6
1.4	Grafik Belanja Pemerintah .....	8
2.1	Bagan Kerangka Konseptual Penelitian.....	45
5.1	Grafik Belanja Pemerintah, Nilai Tukar, Suku Bunga dan Defisit Anggaran dalam Kaitannya dengan Utang Pemerintah, Utang Swasta, dan Pertumbuhan Ekonomi .....	53
5.1	Bagan Estimasi Kerangka Konseptual Penelitian.....	56

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>		<b>Halaman</b>
1	Data Belanja Pemerintah .....	82
2	Data Nilai Tukar .....	83
3	Data Suku Bunga .....	84
4	Data Defisit Anggaran .....	85
5	Data Utang Pemerintah .....	86
6	Data Utang Swasta .....	87
7	Data Pertumbuhan Ekonomi .....	88

# BAB I

## PENDAULUAN

### 1.1 Latar Belakang

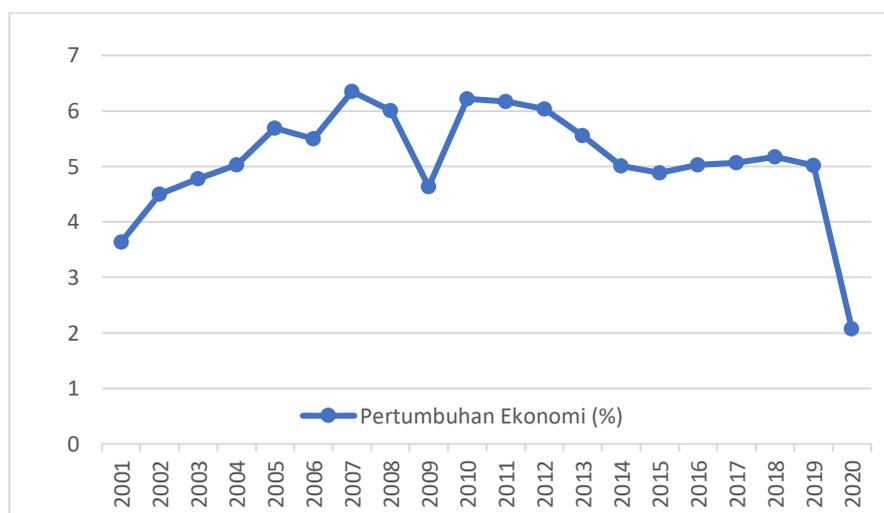
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang sebelum terjadinya krisis moneter. Sejak krisis ekonomi yang diawali dengan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1997 lalu membuat guncang stabilitas perekonomian dan stabilitas sosial politik. Indonesia juga memiliki sejarah kelam yang disebabkan oleh utang. Kondisi ini kemudian mendorong timbulnya krisis kepercayaan terutama terhadap kemampuan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian. Krisis kepercayaan ini ditandai oleh semakin merosotnya nilai tukar dan stabilitas sistem pembayaran akibat terjadinya pelarian modal (*capital outflow*). Kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan juga merosot yang ditandai dengan penarikan dana (*rush*) secara besar-besaran.

Dalam setiap penyelenggaraan negara, pemerintah menetapkan suatu kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial-budaya, serta pertahanan didalamnya tersirat supaya terwujud kesejahteraan di negaranya. Tapi, tidak semua negara bisa dengan mudah mewujudkan hal tersebut. Pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan dana yang relatif besar. Sementara disisi lain, usaha pengurangan dana untuk membiayai pembangunan tersebut mengalami defisit anggaran. Strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dalam mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat dan berkelanjutan (*fiscal sustainability*), tetapi masih dapat memberikan ruang untuk stimulus fiskal dalam batas-batas kemampuan keuangan negara. Kebijakan fiskal secara umum adalah kearah ekspansif yang dicerminkan dari adanya kebijakan

defisit, sehingga dapat memberikan andil dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan kegiatan dalam perekonomian berkembang dan mengakibatkan peningkatan produksi barang dan jasa serta adanya peningkatan kemakmuran masyarakat (Kumorotomo, 2004). Masalah makroekonomi dalam jangka panjang melihat permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi. Kemampuan suatu negara dalam peningkatan barang dan jasa yang diproduksi harus selalu terjadi dalam satu waktu ke waktu lainnya. Peningkatan kemampuan ini terjadi karena adanya tambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah kuantitas maupun kualitasnya. Aktivitas perekonomian dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat ditunjukkan oleh sejauh mana pertumbuhan ekonomi terjadi pada suatu periode tertentu.

Grafik 1.2 Perubahan Ekonomi Indonesia Tahun 2001-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

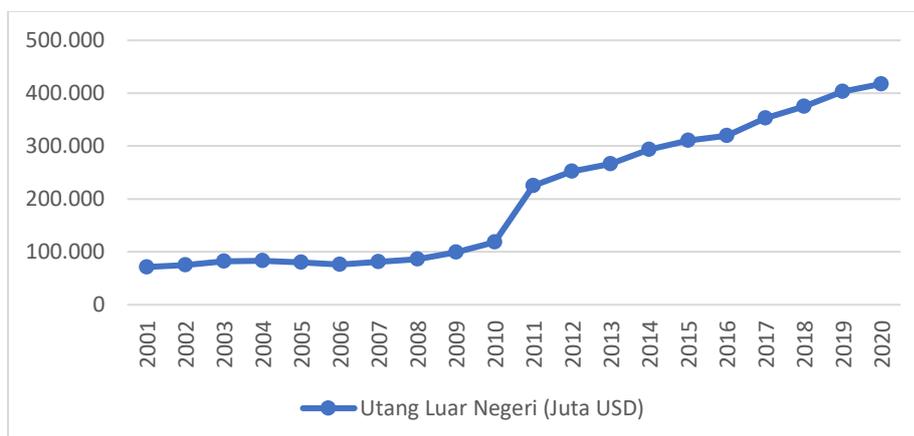
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak tahun 2011 dapat dilihat pada Grafik 1.2 di atas yang secara keseluruhan mengalami fluktuatif. Puncak terendah yaitu sebesar 2,07% pada tahun 2020, namun peningkatan utang luar negeri tidak diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia

yang mengalami fluktuatif selama periode tersebut dan bahkan pertumbuhan Indonesia mengalami penurunan drastis di tahun 2020.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemerintah membutuhkan sumber modal lain untuk menyempurnakan pendanaan APBN. Langkah alternatif yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pinjaman dari luar negeri, serta untuk mendanai kegiatan perekonomian. Dilihat dari jenis utang negara adalah utang dalam negeri dan utang luar negeri. Tujuan pemerintah melakukan utang dalam jangka panjang adalah untuk kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali, sehingga kesinambungan fiskal dan moneter dapat dipelihara. Sedangkan dalam jangka pendek bertujuan untuk memastikan tersedianya dana dalam pembelanjaan pemerintah.

Anggaran pengeluaran dan belanja negara merupakan topik yang saat ini sering dijadikan bahan diskusi berkaitan dengan sering dibahasnya utang pemerintah, apalagi dalam masa ekonomi lemah seperti saat ini dimana nilai rupiah sedang terpuruk. Rupiah yang melemah akan menambah besar beban utang luar negeri yang harus dibayarkan. Bahkan lebih jauh lagi utang luar negeri telah membawa banyak negara berkembang penghutang besar tersebut masuk ke dalam perangkap utang (*debt trap*) dan hanyut dalam lingkaran ketergantungan utang (*debt overhang*). Hal tersebut menjadi acuan pemerintah untuk melakukan pinjaman luar negeri sebagai salah satu instrumen bantuan dalam pembangunan berbagai aspek kehidupan bernegara.

Grafik 1.1 Utang Luar Negeri Indonesia Tahun 2001-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Indonesia menempatkan utang sebagai salah satu tiang stimulus pembangunan ekonomi sebagai komponen penutup kekurangan anggaran. Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada Tahun 2011 sebesar 225,375 miliar dollar AS dan pada tahun 2020 tercatat sebesar 417,5 miliar dolar AS. Kebutuhan belanja untuk membangun lebih besar dari pertumbuhan ekonomi, sehingga menyebabkan defisit anggaran ditutupi oleh utang pemerintah. Sebagaimana dikatakan Nurkse, bahwa modal sebenarnya dibuat di dalam negeri. Sehingga, peranan modal asing sebenarnya adalah sebagai sarana efektif untuk memobilisasi keinginan suatu negara (Nurkse, 1961). Dengan demikian, modal asing telah menjadi beban utang yang besar bagi negara Indonesia, sehingga berdampak pada APBN.

Utang luar negeri merupakan konsekuensi biaya yang harus dibayar sebagai akibat pengelolaan perekonomian yang tidak seimbang, ditambah lagi proses pemulihan ekonomi yang tidak komprehensif dan konsisten. Pada masa krisis ekonomi, utang luar negeri Indonesia termasuk utang luar negeri pemerintah telah meningkat drastis. Sehingga, pemerintah Indonesia harus

menambah utang luar negeri yang baru untuk membayar utang luar negeri yang lama yang telah jatuh tempo. Akumulasi utang luar negeri akan dibayar melalui APBN RI dengan cara mencicilnya pada tiap tahun anggaran (Malik dan Kurnia, 2017).

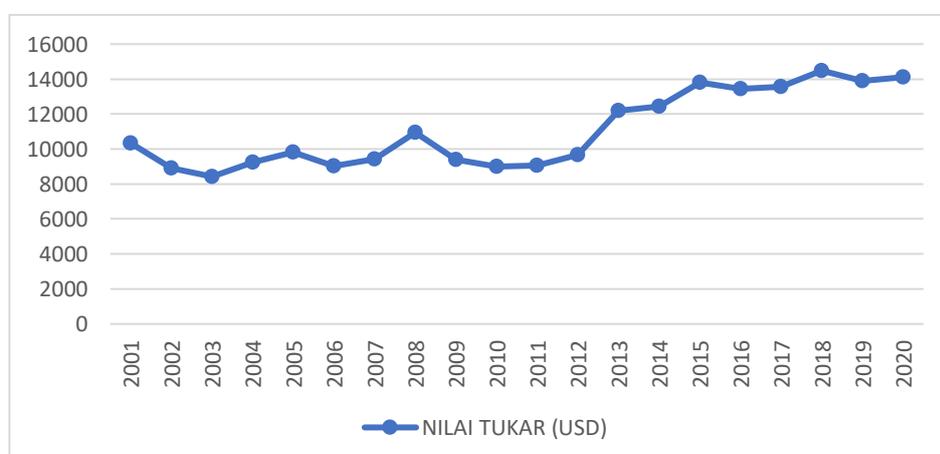
Bapak Pendiri Amerika Serikat, Alexander Hamilton, percaya bahwa “utang nasional, jika tidak berlebihan, akan menguntungkan kita semua” sedangkan James Madison, Presiden Amerika Serikat ke-4, berpendapat bahwa “utang publik adalah kutukan”. Berdasarkan teori ketergantungan utang (*debt overhang theory*), pada tingkat akumulasi utang yang besar ternyata utang tersebut justru akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam jangka panjang utang akan lebih besar dari kemampuan membayar negara debitur, biaya dari bunga utang diperkirakan akan mendesak investasi domestik dan asing dan akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi (Pattillo C dkk, 2002).

Utang luar negeri umumnya terjadi pada negara yang mengalami kekurangan tabungan domestik maupun valuta asing dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. (Siddique, 2016) menunjukkan bahwa utang luar negeri merupakan satu sumber pembiayaan yang penting dalam melengkapi sumber dana dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Tingkat utang luar negeri yang tinggi membawa risiko bagi pertumbuhan dengan semakin tergantungnya ekonomi terhadap fluktuasi nilai tukar sehingga dapat memicu krisis keuangan maupun krisis ekonomi nasional.

Untuk mengumpulkan modal dari luar negeri, perlu adanya kesanggupan untuk menggerakkan tabungan dalam negeri secara produktif dan juga menciptakan sebuah struktur yang memungkinkan tingkat investasi swasta yang

cukup tinggi. Teori Neo Klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi yang besar penting bagi pembentukan modal, dipandang pula sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keynes mengatakan bahwa pendapatan merupakan hal penting bagi investasi dan tingkat bunga, karena suku bunga tergantung pada penawaran dan permintaan uang, dan tidak tergantung pada investasi. Menurut Samuelson dan Nordhaus dalam (Utami, 2014) investasi memiliki peran penting dalam perekonomian, yaitu sebagai komponen pengeluaran yang besar dan mudah berubah, perubahan yang besar dalam investasi akan mengakibatkan perubahan drastis dalam aggregate demand. selain itu, investasi dapat mengakibatkan akumulasi modal. Penambahan modal mengakibatkan peningkatan output nasional yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perlu adanya dukungan dari investasi swasta, yang tidak hanya dari dalam negeri saja, tetapi juga dari luar negeri.

Grafik 1.3 Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Tahun 2001-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan Grafik 1.3 diatas, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar juga dapat mempengaruhi peningkatan nilai utang luar negeri. Semakin

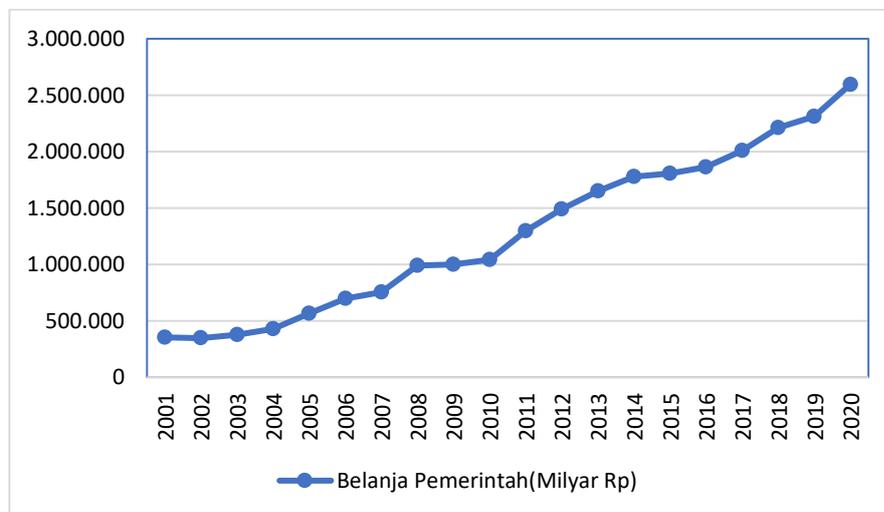
kuat nilai tukar menunjukkan bahwa perekonomian negara tersebut semakin mapan yang mana nilai tukar digunakan sebagai alat transaksi internasional, serta pergerakan nilai tukar yang fluktuatif dari setiap tahunnya. Beberapa bukti empiris lainnya tentang analisis utang luar negeri Indonesia dengan pendekatan keseimbangan makroekonomi menunjukkan bahwa utang luar negeri Indonesia juga berkaitan dengan faktor-faktor non-ekonomi. Hal ini terlihat dari adanya faktor lain yang cukup berpengaruh terhadap besarnya utang luar negeri Indonesia, yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Hal ini dapat dimaklumi karena hutang luar negeri Indonesia dinyatakan dalam dolar AS, artinya jika rupiah terdepresiasi terhadap dolar AS, maka hal itu akan membuat hutang luar negeri Indonesia juga mengalami peningkatan (Fawwaz, 2019).

Utang luar negeri dapat membantu pembiayaan pembangunan ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Tetapi, penggunaan utang luar negeri yang tidak dilakukan dengan bijaksana dan tanpa prinsip kehati-hatian, dalam jangka panjang utang luar negeri justru akan menjerumuskan negara debitur ke dalam krisis utang luar negeri yang berkepanjangan, yang sangat membebani masyarakat karena adanya akumulasi utang luar negeri yang sangat besar. Suatu negara biasa melakukan pengeluaran lebih banyak ketimbang produksinya dengan meminjam dari luar negeri, atau biasa melakukan pengeluaran lebih kecil dari produksinya dan memberi pinjaman pada negara lain.

Saat ini pemerintah Indonesia mengambil kebijakan fiskal ekspansif dimana belanja negara lebih besar dari pada pendapatan negara untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Hal ini menyebabkan pemerintah

menambah utang dalam menutupi defisit anggaran serta pembayaran pokok utang yang jatuh tempo.

Grafik 1.4 Grafik Belanja Pemerintah Tahun 2001-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan Grafik 1.4 diatas menunjukkan bahwa belanja pemerintah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 sebesar 2.309.287 (Milyar Rupiah) hingga tahun 2020 sebesar 2.595.481 (Milyar Rupiah). Peningkatan ini diikuti juga oleh peningkatan utang luar negeri Indonesia. Dapat dikatakan bahwa utang luar negeri merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembiayaan bagi negara Indonesia. Pengelolaan utang luar negeri pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (19,0% dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,5%), sektor jasa pendidikan (16,1%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,4%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (13,4%). Belanja pemerintah harus sesuai kebutuhan, menjaga sektor yang prioritas yang

mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa proyek infrastruktur yang dibiayai dari pinjaman utang seperti Program Pembangunan Jalan Tol Kementerian PUPR dibiayai melalui pinjaman luar negeri sebesar USD 4,77 Miliar dan pembangunan Pelabuhan Patimban tahap satu dan dua dibiayai melalui pinjaman luar negeri sebesar USD 991,06 juta dengan nilai kurs 14.200.

Beberapa bukti empiris berikut menjadi referensi dilakukannya penelitian ini. Penelitian yang dilakukan (Bramantya & Sulasmiyati, 2017) menemukan bahwa utang luar negeri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel suku bunga menghasilkan bahwa di beberapa negara seperti China dan Indonesia tingkat suku bunga berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh (Basten et al., 2021) menemukan bahwa utang luar negeri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syafi'i et al., 2021) menemukan bahwa utang luar negeri tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menciptakan kesinambungan ekonomi seringkali terkendala pada pendapatan yang selalu lebih kecil dibandingkan pengeluaran yang diharapkan terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami fluktuatif disebabkan sejumlah biaya yang harus dialokasikan dengan nominal dikatakan tidak cukup kecil. Bantuan luar negeri mempunyai peran penting dalam mengurangi kendala utamanya yaitu defisit anggaran. Hal ini perlu diwaspadai oleh pihak pemerintah dan pihak swasta yang menerima modal sehingga diperlukan kebijakan yang tepat.

Angka statistik utang luar negeri Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia mengalami ketergantungan sumber dana luar negeri. Bahkan beberapa

pengamat ekonomi di Indonesia mengatakan bahwa utang luar negeri kita berada pada posisi yang rawan dan dapat mengganggu kondisi perekonomian. Apabila posisi ketergantungan terhadap modal asing semakin besar, maka semakin besar resiko sistem global yang dihadapi oleh pihak pemerintah dan pihak swasta. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi utang luar negeri Indonesia, diantaranya belanja pemerintah, nilai tukar, suku bunga, defisit anggaran. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji masalah **“Pengaruh Belanja Pemerintah, Nilai Tukar, Suku Bunga, dan Defisit Anggaran Terhadap Utang Luar Negeri dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah belanja pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara langsung maupun tidak langsung melalui utang pemerintah dan utang swasta Indonesia?
2. Apakah nilai tukar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara langsung maupun tidak langsung melalui utang pemerintah dan utang swasta Indonesia?
3. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara langsung maupun tidak langsung melalui utang pemerintah dan utang swasta Indonesia?
4. Apakah defisit anggaran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara langsung maupun tidak langsung melalui utang pemerintah dan utang swasta Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung melalui utang pemerintah dan utang swasta Indonesia.
2. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung melalui utang pemerintah dan utang swasta Indonesia.
3. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung melalui utang pemerintah dan utang swasta Indonesia.
4. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh defisit anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung melalui utang pemerintah dan utang swasta Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian ini bagi akademisi yakni sebagai karya akademik, hasil penelitian ini diharapkan sebagai suatu bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya yang terkait dengan pengembangan teori ekonomi makro dan ekonomi pembangunan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian ini, diharapkan dapat memberi kontribusi dan menjadi masukan bagi pihak-pihak penentu kebijakan ekonomi agar

dapat mempertimbangkan berbagai aspek dalam mengambil kebijakan utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Grand Theory**

Penelitian ini mengkaji belanja pemerintah, nilai tukar, suku bunga dan defisit anggaran, serta pengaruhnya terhadap utang luar negeri Indonesia. Pada umumnya Utang Luar Negeri merupakan pinjaman pihak pemerintah maupun swasta yang didapat dari pihak luar negeri, baik melalui pinjaman lembaga keuangan internasional (IMF, Bank Dunia, Asian Development Bank) ataupun dari pihak Negara Maju (Jepang, China, Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dll). Dengan demikian, menurut teori Harrod Domar, utang luar negeri di negara berkembang disebabkan oleh ketidakcukupan tabungan dan investasi untuk membiayai pembangunan. Apabila tabungan domestik tidak mencukupi, untuk mengejar proyeksi angka pertumbuhan ekonomi, diperlukan utang luar negeri (Williamson, 1985). Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga rendah.

Sejak krisis utang dunia pada awal 1980-an, masalah utang yang dialami oleh banyak negara berkembang yakni kekurangan modal. Banyak negara berkembang semakin terjerumus ke dalam krisis utang luar negeri. Sebagai akibat pengutang besar, muncullah kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan modal asing atas desakan dari Bank Dunia dan Lembaga Dana internasional (IMF), sebagai syarat utama untuk mendapatkan pinjaman baru atau pengurangan terhadap pinjaman lama (Tambunan, 2009). Sebab menurut (W.W. Rostow, 1985), suatu negara bisa tinggal landas jika tidak lagi

tergantung kepada utang luar negeri. Dia berpendapat, bahwa masalah utang luar negeri sebagai kendala serius bagi banyak negara yang sedang berkembang untuk bisa masuk dalam tahap take-off.

Dalam perekonomian terbuka Keynes menyatakan bahwa permintaan agregat (AD) seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah serta ekspor dan impor akan mempengaruhi permintaan akan barang dan jasa. Teori ekonomi Keynesian agregat demand (AD) menentukan sebuah pertumbuhan ekonomi di dalam perekonomian yang ditentukan oleh permintaan yang diikuti oleh usaha dalam membayar permintaan akan sebuah barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah versi Keynes, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Dimana formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel  $Y$  melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan tersebut disebut permintaan agregat. Variabel  $G$  melambangkan pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai  $G$  terhadap  $Y$  serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Anitasari & Soleh, 2012).

Pembelian pemerintah ( $G$ ) yang lebih tinggi mengakibatkan pengeluaran yang direncanakan ( $AE$ ) yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Jika Pembelian pemerintah naik sebesar  $\Delta G$ , maka kurva pengeluaran yang direncanakan bergeser ke atas sebesar  $\Delta G$ . Sehingga hal ini mengakibatkan pergeseran pada keseimbangan perekonomian, hal ini dikarenakan jika semakin meningkatnya pendapatan diakibatkan oleh semakin naiknya pembelian pemerintah, yaitu  $Y$  dan lebih besar dari  $G$ . rasio  $\Delta Y/\Delta G$  disebut pengganda pembelian pemerintah (*government purchases multiplier*), rasio ini menyatakan

berapa banyak pendapatan meningkat dalam menanggapi kenaikan satu satuan dalam pembelian pemerintah. Implikasi dari perpotongan Keynesian adalah bahwa pengganda pembelian pemerintah lebih besar dari 1.

Kenaikan dalam pendapatan lebih besar dari kenaikan dalam pengeluaran pemerintah. Hal ini karena adanya efek berantai (multiplier effect) terhadap pendapatan. Menurut fungsi konsumsi  $C = C(Y-T)$ , pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi. Ketika kenaikan dalam pembelian pemerintah terjadi meningkatkan pendapatan, juga meningkatkan konsumsi, yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan, yang kemudian meningkatkan konsumsi, dan seterusnya. Oleh karena itu, dalam model ini kenaikan dalam pembelian pemerintah menyebabkan kenaikan dalam pendapatan dalam jumlah yang lebih besar (Ramadhani, 2014).

Devarajan, Swaroop, dan Zou (1996) melakukan studi mengenai hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, dengan menilik lebih dalam ke komposisi dari pengeluaran pemerintah. Studi ini memberikan hasil bahwa pengeluaran pemerintah yang bersifat current (pengeluaran operasional) lebih signifikan positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran pemerintah untuk capital yang bersifat lebih produktif justru secara signifikan negative mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

Pandangan Keynes-Klasik. Pandangan mainstream ekonomi (Klasik maupun Keynesian) menyatakan bahwa tidak pernah ada bicara tentang pembiayaan tetapi yang ada hanya membicarakan expenditure yang setidaknya akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian. Pandangan Keynesian memposisikan pada government expenditure, di mana pada kondisi krisis, maka

defisit diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Sedang menurut pemikiran Klasik, dalam keseimbangan, maka balanced budget, akan lebih penting. Kalau terjadi defisit maka dengan adanya tambahan uang akan mengakibatkan efek inflasi, ini apabila tidak segera ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan di sektor riil yang lebih baik serta penambahan permintaan masyarakat (Soebagiyo, 2012).

Salah satu kebijakan pemerintah yaitu untuk memenuhi belanja pemerintah dan defisit anggaran dengan berutang luar negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, utang luar negeri Indonesia menjadi pemicu krisis tersebut. Sehingga nilai mata uang rupiah menjadi lemah dan akhirnya menimbulkan banyak permasalahan terutama utang luar negeri yang sangat tinggi. Jumlah utang luar negeri yang semakin meningkat dan juga pergerakan nilai tukar rupiah yang berfluktuasi dapat menjadi beban bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Depresiasi rupiah akan menyebabkan jumlah utang luar negeri meningkat karena Indonesia membayar utang luar negeri dalam valuta asing. Selain itu, hal tersebut meningkatkan risiko terhadap bunga yang harus dibayarkan pada pinjaman dengan jangka waktu yang lebih lama dan mengarah pada nilai tukar jangka panjang yang lebih tinggi serta berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan. Utang luar negeri digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan melalui kebijakan defisit anggaran. Defisit anggaran menunjukkan bahwa kondisi belanja pemerintah lebih besar daripada penerimaannya. Sehingga, negara yang kondisi anggarannya defisit membutuhkan tambahan dana agar kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan. Oleh sebab itu pemerintah wajib berutang

terhadap pihak luar untuk memperoleh dana guna menutupi defisit anggaran tersebut

Menurut Triboto, berdasarkan aspek materiil, pinjaman luar negeri merupakan arus masuk modal dari luar negeri ke dalam negeri yang dapat digunakan sebagai penambahan modal di dalam negeri. Berdasarkan aspek formal, pinjaman luar negeri merupakan penerimaan atau pemberian yang dapat digunakan untuk meningkatkan investasi guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Sedangkan berdasarkan aspek fungsinya, pinjaman luar negeri merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan (Triboto, 2001).

## **2.2 Utang Luar Negeri**

Utang luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditur di luar negeri tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia (Ulfa, 2017). Utang luar negeri merupakan arus masuk modal dari luar ke dalam negeri yang dapat menambah modal yang ada dalam negeri. Aspek formal mengartikan utang luar negeri sebagai penerimaan atau pemberian yang dapat digunakan untuk meningkatkan investasi guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Sehingga berdasarkan aspek fungsinya, pinjaman luar negeri merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan.

Adapun teori utang luar negeri adalah teori yang dikembangkan oleh Paul Baran dan Probish ini menyatakan bahwa bantuan luar negeri digunakan oleh negara kaya untuk mempengaruhi hubungan domestik dan luar negeri negara

penerima bantuan, merangkul elit politik lokal di negara penerima bantuan untuk tujuan komersil dan keamanan nasional. Kemudian, melalui jaringan internasional, keuangan internasional dan struktur produksi, bantuan luar negeri diajukan untuk mengeksploitasi sumber daya alam negara penerima bantuan. Sehingga para penganut teori dependensial menganggap bahwa bantuan luar negeri dapat digunakan sebagai sebuah instrumen untuk perlindungan dan ekspansi negara kaya ke negara miskin, sebuah sistem untuk mengekalkan ketergantungan (Kuncoro, 2002).

Utang luar negeri dapat dijelaskan dari berbagai aspek yang dikemukakan berikut ini:

1. Jenis-jenis utang luar negeri

Menurut Tibroto (2001) mengklasifikasikan jenis-jenis utang luar negeri dari berbagai aspek yaitu berdasarkan bentuk pinjaman yang diterima. Sumber dana pinjaman, jangka waktu peminjaman, status peminjaman dan persyaratan peminjaman. Berdasarkan bentuk pinjaman yang diterima, pinjaman dibagi atas :

- a. Bantuan proyek yaitu bantuan luar negeri yang digunakan untuk keperluan proyek pembangunan dengan cara memasukkan barang modal, barang dan jasa.
- b. Bantuan teknis yaitu pemberian bantuan tenaga-tenaga terampil atau ahli.
- c. Bantuan program yaitu bantuan yang dimaksudkan untuk dana bagi tujuan-tujuan yang bersifat umum sehingga penerimanya bebas memilih penggunaannya sesuai pilihan.

Berdasarkan sumber dana peminjaman, pinjaman dibagi atas: Pinjaman dari lembaga internasional yaitu pinjaman yang berasal dari badan-badan internasional seperti World Bank dan Asia Development Bank, yang pada

dasarnya adalah pinjaman yang berbunga ringan. Pinjaman dari negara-negara anggota IGGI/IGI, hampir sama seperti pinjaman dari lembaga internasional, hanya biasanya pinjaman ini dari negara-negara bilateral anggota IGGI/IGI. Biasanya berupa pinjaman lunak.

Berdasarkan jangka waktu peminjaman, pinjaman dibagi atas:

- a. Pinjaman jangka pendek yaitu pinjaman dengan jangka waktu sampai dengan lima tahun.
- b. Pinjaman jangka menengah yaitu pinjaman dengan jangka waktu 5-15 tahun.
- c. Pinjaman jangka panjang yaitu pinjaman dalam jangka waktu diatas 15 tahun.

Berdasarkan status penerimaan pinjaman, pinjaman dibagi atas:

- a. Pinjaman pemerintah yaitu pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Pinjaman swasta yaitu pinjaman yang dilakukan oleh pihak swasta

Sedangkan berdasarkan persyaratan pinjaman, pinjaman dibagi atas:

- a. Pinjaman lunak yaitu pinjaman yang berasal dari lembaga multilateral maupun bilateral yang dananya berasal dari iuran anggota (untuk multilateral) atau dari anggaran negara yang bersangkutan (untuk bilateral) yang ditujukan untuk meningkatkan pembangunan.
- b. Pinjaman setengah lunak yaitu pinjaman yang memiliki persyaratan pinjaman yang sebagian lunak dan sebagian komersial.
- c. Pinjaman komersial yaitu pinjaman yang bersumber dari bank atau lembaga keuangan dengan persyaratan yang berlaku di pasar internasional pada umumnya.

## 2. Kebutuhan Utang Luar Negeri Dalam Pembangunan

Apabila dikaji secara mendalam dari berbagai aspek kehidupan bangsa, maka utang luar negeri bagi negara-negara berkembang secara umum memang sangat dibutuhkan untuk kepentingan yaitu:

- a. Menciptakan stabilitas, terutama stabilitas ekonomi. Indonesia misalnya yang memulai pembangunannya mengalami distabilitas yang cukup berat dan multidimensi, distabilitas ekonomi, sosial, ekonomi, dan politik.
- b. Bantuan luar negeri juga sangat dibutuhkan untuk kepentingan pembiayaan teknis dan program, mengingat tingkat keahlian dan profesionalisme di negara yang sedang membangun masih sangat rendah.
- c. Pinjaman luar negeri juga sangat dibutuhkan untuk kepentingan perubahan struktur ekonomi, sehingga lebih mempercepat proses industrialisasi dan atau penyediaan prasarana dan sarana struktur ekonomi suatu negara.
- d. Utang luar negeri juga sangat dibutuhkan guna mengatasi krisis ekonomi.
- e. Bantuan luar negeri juga sangat dibutuhkan pula untuk membiayai sejumlah peralatan militer guna menjaga stabilitas keamanan.

## 3. Karakteristik Krisis Utang dan Pembentukan Utang

untuk mengukur sejauh mana tingkat utang membebani suatu negara, kita dapat lihat dari beberapa aspek. Aspek tersebut sebagai berikut:

- a. Tingkat Debt Service Ratio (DSR), yaitu perbandingan antara pembayaran bunga plus cicilan utang terhadap penerimaan ekspor suatu negara tahun yang sama. Sebagai contoh DSR Brazil dan Korea Selatan pada tahun 1982 masing-masing sebesar 81% dan 2,2%. Ini berarti Brazil

menggunakan 81% dari eksportnya untuk membayar utang dan Korea Selatan hanya menggunakan 2,2%.

- b. Menurut pengalaman di banyak negara batas aman untuk DSR adalah 20%. Persentase utang terhadap GDP (debt to GDP ratio). Meskipun secara absolut jumlahnya kecil, tetapi jika persentase terhadap GDP relatif besar, hal ini akan memberatkan negara tersebut.

Dalam perkembangannya kemudian, pihak pemberi pinjaman mulai menyadari peningkatan utang negara berkembang telah melampau titik batas, yang dapat membahayakan mereka dan negara berkembang bersangkutan. Hal ini dikarenakan kecepatan peningkatan sumberdaya dalam negeri tidak dapat mengimbangi peningkatan jumlah bantuan. Inilah yang menandai bahwa fenomena debt-led growth telah bergeser menjadi growth-led debt, obsesi mengejar pertumbuhan menyebabkan peningkatan kebutuhan akan utang, hingga akhirnya bermuara pada krisis utang negara berkembang pada awal dasawarsa 1980-an.

#### 4. Upaya Untuk Mengurangi Beban Utang Luar Negeri

Menurut Tambunan (2008) upaya untuk mengurangi beban utang luar negeri bisa dilakukan dengan 4 cara (1) pengurangan atau pemotongan, penundaan dan penjadwalan ulang pembayaran cicilan pokok, dan bunga utang; (2) konversi utang; (3) melunasi lebih awal utang jangka pendek; dan atau (4) meminta penghapusan utang yang masih ada. Cara 1 sampai 3 merupakan strategi jangka pendek. Pada era reformasi, Presiden Megawati yang pertama kali meminta dalam pidato kenegaraan 16 agustus 2004 agar IMF bersedia untuk memprakarsai penjadwalan ulang pembayaran cicilan utang luar negeri Indonesia supaya tersedia lebih banyak dana yang dibutuhkan untuk membiayai

pembangunan berbagai proyek dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, cara 4 adalah mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri atau mengurangi pembuatan utang baru. Permintaan keinginan pembayaran utang luar negeri pemerintah dari sumber resmi dilakukan melalui Paris Club. Menurut konversi umum yang berlaku, ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pemerintah debitur untuk bisa mengajukan permohonan keringanan pembayaran utang luar negeri melalui Paris Club:

- a. Mengikuti program IMF, melalui program ini negara-negara kreditur dapat memahami alasan permohonan tersebut dan bisa memantau bukan saja penggunaan pinjaman baru tetapi juga kemampuan negara debitur untuk membayar kembali utang luar negeri mereka.
- b. Status pinjaman yang didapat oleh negara yang bersangkutan dari Bank Dunia. Dalam persyaratan ini, keringanan hanya diberikan kepada negara yang bisa menunjukkan perlunya keringanan tersebut dan negara yang selama itu hanya mampu meminjam dari *International Development Association (IDA)*.

Berdasarkan pendapat Tendelilin (2001), Ahmad (2014), dan Jogiyanto (2003) dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan pengorbanan yang dilakukan pada hari ini untuk memperoleh manfaat lebih baik di waktu yang akan datang.. Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan nilai investasi dimasa mendatang (Hidayati, 2017).

Model Neoklasik tentang pinjaman menekankan bahwa ketika pemerintah memulai sebuah proyek, baik didanai oleh pajak-pajak atau pinjaman, sumber daya dipindahkan dari sektor swasta. Seseorang biasanya menganggap bahwa ketika pendanaan pajak digunakan, sebagian besar sumber-sumber yang berpindah masuk pada belanja pemerintah atau konsumsi. Di sisi lain, ketika pemerintah meminjam, maka dia bersaing untuk dana-dana tersebut dengan individu-individu dan perusahaan-perusahaan yang menginginkan uang bagi proyek-proyek investasi pribadi mereka. Oleh karena itu, pada umumnya ada anggapan bahwa pinjaman memiliki efek paling besar pada investasi pribadi. Dalam kaitan dimana asumsi-asumsi ini adalah benar pendanaan pinjaman meninggalkan generasi masa depan dengan sebuah stok modal yang lebih kecil, *ceteris paribus* (Rossen, 2002).

Dari perspektif negara donor setidaknya ada dua hal yang penting memotivasi dan melandasi mengalirnya bantuan luar negeri ke negara-negara debitur. Kedua hal tersebut adalah motivasi politik (*political motivation*) dan motivasi ekonomi (*economic motivation*) yang keduanya mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang satu dengan yang lainnya. Motivasi pertama inilah yang kemudian menjadi acuan bagi Amerika Serikat (AS) untuk mengucurkan dana bantuan dalam merekonstruksi kembali perekonomian Eropa Barat setelah hancur saat perang Dunia II dan program ini kemudian dikenal dengan Marshall Plan (Todaro, 1985). Kesuksesan dalam membangun kembali Eropa Barat menjadikan program ini sebagai cetak biru (*blue print*) yang kemudian digunakan dalam proses pengembangan ekonomi di berbagai belahan dunia lainnya seperti Asia Selatan, Asia Tenggara, Amerika Latin, bahkan kemudian sampai menyentuh Afrika serta Amerika Tengah. Sedangkan motivasi ekonomi sebagai

landasan kedua yang digunakan dalam memberikan bantuan, setidaknya-tidaknya tercermin dari 4 argumen penting (Todaro, 1985) :

- a. Foreign exchange constraints yang didasari atas two gap model dimana negara-negara penerima bantuan khususnya negara-negara berkembang mengalami kekuarangan dalam mengakumulasi tabungan domestik (domestik saving) sehingga tingkat tabungan yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan akan tingkat investasi yang dibutuhkan dalam proses memicu pertumbuhan ekonomi. Dan pada sisi lain adalah kekurangan yang dialami oleh negara yang bersangkutan dalam memenuhi kebutuhan nilai tukar asing (Foreign Exchange) untuk membiayai kebutuhan impor barang modal (capital goods) dan impor barang-barang intermediate (intermediate good).
- b. Growth and savings yaitu untuk memfasilitasi dan mengakselerasi proses pembangunan dengan cara meningkatkan pertambahan tabungan domestik sebagai akibat dari tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Hal ini karena tingginya tingkat pertumbuhan di negaraa-negara berkembang akan turut meningkatkan atau
- c. Berkorelasi positif terhadap kenaikan keuntungan yang bisa dinikmati oleh negara-negara maju seperti yang dibuktikan dalam studi Cooper (1995).
- d. Tehnical assistance yang merupakan pendamping dari bantuan keuangan yang bentuknya adalah transfer sumber daya manusia tingkat tinggi kepada negara-negara penerima bantuan.
- e. Absorptive capacity yaitu dalam bentuk apa dana itu digunakan.

## **2.3 Belanja Pemerintah**

### **2.3.1 Pengertian Belanja Pemerintah**

Belanja pemerintah adalah salah satu unsur permintaan agregat. Belanja pemerintah menggunakan konsep perhitungan pendapatan nasional dengan persamaan Sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Belanja Pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk Pengeluaran Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. Wagner (dalam Putri dan Cahyono, 2012) mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Dengan tumbuhnya perekonomian hubungan antara industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit. Hal ini cukup berbeda ketika sebuah negara meminjam dari luar negeri untuk mendanai pengeluaran setiap tahunnya. Ini disebut sebagai pinjaman eksternal. Dengan beranggapan bahwa uang yang dipinjam dari luar negeri digunakan untuk mendanai defisit anggaran dari belanja pemerintah saat ini, maka generasi masa depan tentu menanggung sebuah beban, karena tingkat konsumsinya dikurangi oleh satu jumlah yang sama dengan pinjaman ditambah dengan bunga yang ditambahkan yang harus dikirimkan ke penyedia dana dari luar negeri (Saleh, 2008).

Peran belanja pemerintah dalam perekonomian dapat dijelaskan melalui Fungsi Pendapatan Nasional yang dikemukakan oleh Keynes. Belanja pemerintah merupakan salah satu komponen pembentuk produk domestik bruto

(PDB) suatu negara, atau produk domestik regional bruto (PDRB) suatu wilayah. Belanja pemerintah tidak menyertakan komponen pembayaran transfer karena tidak terdapat pertukaran dengan sebagian output barang dan jasa perekonomian. Sebagai salah satu komponen pengeluaran, belanja pemerintah yang lebih tinggi mengakibatkan pengeluaran yang direncanakan yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan (Mankiw, 2007).

Menurut (Sutiono, 2018) pengeluaran pemerintah dapat berupa pengeluaran untuk belanja barang dan jasa, pengeluaran untuk pembayaran gaji pegawai, dan pengeluaran untuk pembayaran transfer payment. Belanja modal merupakan salah satu jenis pengeluaran pemerintah yang termasuk dalam klasifikasi belanja barang dan jasa. Belanja modal digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari satu periode anggaran. Output dari belanja modal adalah perolehan aset yang dapat memberikan manfaat melebihi satu periode sehingga pada umumnya dapat digunakan dalam jangka panjang sesuai masa manfaat ekonomis aktiva tersebut. Mankiw (2006) menyebutkan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Kenaikan pengeluaran yang direncanakan akan menyebabkan peningkatan permintaan agregat. Permintaan agregat akan mendorong produksi barang dan jasa yang akan menyebabkan pendapatan juga akan meningkat (Nalle & Hidayat, 2015).

Menurut Sukirno (1994) belanja pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja

Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode ke periode lainnya dan ini akan menimbulkan implikasi yang serius kepada belanja pemerintah setiap tahunnya,

Teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (dalam Mangkoesobroto, 2008) yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut: (1) tahap awal, pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (2) tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. (3) tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan dan kesehatan masyarakat.

## **2.2.2 Macam-macam Belanja Pemerintah**

### **1. Belanja Langsung**

Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

- a. Belanja pegawai adalah pengeluaran untuk upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- b. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- c. Belanja modal adalah pengetahuan yang digunakan untuk pembelian atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah suatu daerah.

### **2. Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah.

- a. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD dan pegawai pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- b. Belanja bunga adalah pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.
- c. Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja hibah adalah belanja yang diperlukan untuk menganggarkan pemberian uang barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya. Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada provinsi, kabupaten/kota, desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## 2.4 Nilai Tukar

Kurs yaitu harga dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar mata uang (exchange rate) suatu negara sebagai jumlah satuan mata uang domestik yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain (Levi, 2001). Perdagangan antar negara dimana masing-masing negara mempunyai alat tukarnya sendiri mengharuskan adanya angka perbandingan nilai suatu mata uang lainnya (Salvatore, 2008) dalam (Nurmaini, 2016).

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi permintaan valuta asing yaitu :

1. Faktor pembayaran impor

Semakin tinggi impor barang dan jasa maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga nilai tukar mata uang akan cenderung melemah. Sebaliknya jika impor menurun maka permintaan valuta asing menurun sehingga mendorong menguatnya nilai tukar.

2. Faktor aliran modal keluar (capital outflow)

Semakin besar modal keluar maka semakin besar permintaan valuta asing dan pada akhirnya melemahkan nilai tukar. Aliran modal keluar meliputi pembayaran utang penduduk Indonesia baik swasta dan pemerintah kepada pihak dan penempatan dana penduduk Indonesia keluar negeri.

3. Kegiatan spekulasi

Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulan, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga melemahkan nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing.

## 2.5 Suku Bunga

Menurut Nopirin (1996) suku bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya. Suku bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Tingkat bunga pada hakikatnya adalah harga, yang diekspresikan sebagai persentase pertahun, yang pembebanannya didasari pada jumlah uang yang dipinjam. Suku bunga merupakan pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman (Yazid, 2018).

Suku bunga juga merupakan sebuah harga yang menghubungkan masa kini dengan masa depan, sebagaimana harga lainnya maka tingkat bunga ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Karena itu, suku bunga yang lebih tinggi akan menarik modal asing dan menyebabkan nilai mata uang akan meningkat. Imbas dari suku bunga yang lebih tinggi akan berkurang jika inflasi sebuah negara lebih tinggi dibanding dengan negara lain, atau jika faktor tambahan menarik turun nilai mata uang. Dan begitu juga dalam kondisi sebaliknya, yang karena itu suku bunga lebih rendah cenderung menurunkan nilai mata uang.

## 2.6 Defisit Anggaran

Defisit anggaran adalah anggaran yang memang direncanakan untuk defisit, sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah ( $G > T$ ). Anggaran yang defisit ini biasanya ditempuh bila pemerintah

ingin menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini umumnya dilakukan bila perekonomian berada dalam kondisi resesi.

Defisit anggaran adalah selisih antara jumlah uang yang dibelanjakan pemerintah dan penerimaan dari pajak. Defisit anggaran pemerintah diperlukan untuk mendorong kegiatan ekonomi nasional agar perekonomian terhindar dari kondisi resesi yang berkepanjangan. Pemerintah dapat membiayai defisit anggarannya dengan dua cara yaitu dengan menjual obligasi maupun mencetak uang. Bank Sentral dikatakan mencetak uang ketika Bank Sentral meningkatkan stok uang primer, umumnya melalui pembelian pasar terbuka dengan membeli sebagian utang yang dijual Departemen Keuangan. Ada dua kemungkinan jenis hubungan yang terjadi antara defisit anggaran dengan pertumbuhan uang. Pertama, dalam jangka pendek kenaikan defisit yang disebabkan karena kebijakan ekspansioner akan cenderung menaikkan suku bunga nominal dan riil. Jika Bank Sentral menjaga supaya suku bunga tidak naik, maka dilakukan tindakan dengan meningkatkan pertumbuhan Indonesia. Kedua, pemerintah dengan sengaja menaikkan persediaan uang dengan maksud agar mendapat penerimaan pemerintah dalam jangka panjang (Rahman, 2017). Melalui kebijakan defisit anggaran pemerintah dimungkinkan tercipta lapangan kerja (*employment creation*). Jika lapangan kerja dapat diciptakan akan meningkatkan daya beli masyarakat dan permintaan agregat meningkat.

## **2.7 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno (2007) diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat

meningkat. Dalam Teori Harrod domar berpendapat modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Terdapat beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan PDB dan bukan indikator lainnya seperti pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB) sebagai indikator pertumbuhan. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, data PDB yang digunakan adalah data PDB atas harga konstan. Dengan menggunakan data atas dasar harga konstan, maka pertumbuhan PDB semata-mata hanya mencerminkan pertumbuhan output yang dihasilkan perekonomian pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi dapat tercipta melalui bekerjanya pasar secara efisien.

Tingkat pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dari perubahan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun ke tahun (Salim, 2017).

## **2.8 Hubungan Antar Variabel**

Menurut Atmadja (2000) utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, akibat pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tetapi dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri pemerintah tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan ekonomi di Indonesia. Menurut Arsyad (2010), utang luar negeri merupakan sumber pembiayaan anggaran pemerintah dan pembangunan ekonomi. Utang luar negeri dimanfaatkan untuk membiayai belanja negara sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi, terutama kegiatan-kegiatan produktif sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut George (1992), utang luar negeri secara pragmatis justru menjadi bumerang bagi negara penerima (debitur). Perekonomian di negara-negara penerima utang tidak menjadi semakin baik, melainkan bisa semakin hancur. Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan dari hasil penelitiannya yang menunjukkan, bahwa pada tahun 1980-an arus modal yang mengalir dari negara-negara industri maju, yang umumnya merupakan negara kreditur, ke negara-negara yang sedang berkembang dalam bentuk bantuan pembangunan (official development assistance), kredit ekspor, dan arus modal swasta, seperti bantuan bilateral dan multilateral, investasi swasta langsung (PMA), portofolio investment, pinjaman bank.

Teori Rostow menjelaskan bahwa ada tahap-tahap yang dilewati suatu negara dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan memperkuat tabungan nasional. Pembayaran kembali utang luar negeri yang meningkat dalam jumlah besar tersebut dilakukan oleh pemerintah tidak semata-mata dengan menggunakan dana dari penerimaan dalam negeri, tetapi dengan terpaksa juga menggunakan bantuan dana (utang luar negeri) dari IMF. Jadi, utang luar negeri yang lama dibayar dengan utang luar negeri yang baru. Ini artinya Indonesia telah terjumuk dalam krisis utang luar negeri (Junaedi, 2018).

Teori Harrod-Domar yang menyebutkan bahwa semakin banyak porsi PDB yang ditabung akan menambah capital stock sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan per kapita atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara-negara tersebut belum berarti bahwa pada negara-negara tersebut dengan sendirinya telah dapat dikategorikan menjadi sebuah negara yang maju, dalam arti struktur ekonominya telah berubah menjadi struktur ekonomi industri dan perdagangan luar negerinya sudah mantap. Sebab pada kenyataannya, besar-kecilnya jumlah utang luar negeri yang dimiliki oleh banyak negara yang sedang berkembang lebih disebabkan oleh adanya defisit anggaran, nilai tukar, suku bunga dan kekurangan dana belanja yang tidak dapat ditutup dengan sumber-sumber dana di dalam negeri.

### **2.8.1 Kaitan Teoritis Belanja Pemerintah, Utang Luar Negeri, dan Pertumbuhan Ekonomi**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan gambaran bagaimana pemerintah mengelola penyelenggaraan negara, dalam

prakteknya tidak pernah seimbang terhadap pendapatan. Meskipun tidak ada kesepakatan umum, sebagian pemikir ekonomi menganggap bahwa konsep seimbang dalam APBN Indonesia adalah konsep seimbang yang semu, yang mana defisit dalam anggaran ditutupi oleh komponen utang luar negeri (Rieski prodeo patria, 2018). Namun yang terlihat masalah ketika pertumbuhan ekonomi membaik tetapi utang pun terus bertambah dan malahan belum berkurang beberapa tahun kebelakang. Disini dilihat Indonesia masih sangat membutuhkan bantuan dana pinjaman luar negeri untuk mendorong pembangunan di Indonesia (Defrizal saputra, Hasdi Aimon, 2018).

Sementara jika dilihat postur belanja pemerintah, sebagian besar digunakan untuk membiayai subsidi dan belanja pegawai sehingga perlu dilakukan pengujian apakah utang pemerintah dapat mendorong pertumbuhan atau justru menghambat pertumbuhan. Belanja pemerintah untuk pembiayaan pembangunan ekonomi dengan menggunakan utang, khususnya yang bersumber dari luar negeri memang mendatangkan manfaat, namun selain memperhatikan pemanfaatannya bagi pertumbuhan perekonomian, hal lain yang harus dipikirkan ada beban utang yang muncul dikemudian hari. Namun dalam tahap awal pembangunan, penggunaan komponen utang sebagai sumber pembiayaan memang sangat menguntungkan (Subri dan Basri, 2003). Dengan demikian utang luar negeri merupakan salah satu sumber modal yang dialokasikan dalam belanja pemerintah. Hal ini berkaitan dengan teori Harrod Domar, bahwa modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut.

### **2.8.2 Kaitan Teoritis Nilai Tukar, Utang Luar Negeri, dan Pertumbuhan Ekonomi**

utang luar negeri menggunakan kurs mata uang negara lain yang harus dibeli dengan cara menukarkan rupiah ke kurs mata uang negara tersebut. Maka, ketika Rupiah melemah terhadap Dollar, maka beban utang luar negeri juga akan semakin meningkat. Nilai tukar sebagai alat transaksi mata uang antar negara sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap dollar AS di Indonesia tentu dipicu oleh beberapa faktor penyebab diantaranya adanya tekanan terhadap Rupiah yang terjadi pada jatuh tempo utang luar negeri swasta yang umumnya menggunakan dominasi dollar AS.

Pembayaran utang luar negeri mengikuti besarnya jumlah nilai tukar uang terhadap negara tersebut. mengingat utang luar negeri dikonversikan ke mata uang lain. Dengan begitu, dapat diartikan selalu ada risiko dari pergerakan nilai tukar yang terjadi. Jumlah utang luar negeri terus mengalami peningkatan dan juga pergerakan nilai tukar Rupiah yang berfluktuasi semakin menjadi beban bagi perkembangan ekonomi Indonesia serta biaya pembangunan yang berkelanjutan yang signifikan membutuhkan dana yang cukup untuk menyelesaikan persoalan ekonomi (Ibrahim et al., 2019). Kekurangan dana tersebut dipenuhi oleh utang luar negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta biaya transaksi impor berdasarkan dari nilai tukar tersebut.

Utang luar negeri yang tinggi akan menyebabkan naiknya inflasi. Defisit anggaran bisa ditutup dengan menjual bond pemerintah atau mencetak uang. Keadaan bisa memburuk bila hutang yang besar menyebabkan negara tersebut default (gagal bayar) sehingga peringkat hutangnya turun. Utang luar negeri

yang tinggi jelas akan cenderung memperlemah nilai tukar mata uang negara tersebut.

### **2.8.3 Kaitan teoritis suku bunga, utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi**

Suku bunga merupakan salah satu variable makro ekonomi yang menjadi patokan pasar dan investor. suku bunga dalam hal ini juga sangat mempengaruhi peningkatan utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi. Dampak negatif bunga utang luar negeri terjadi jika menjadi beban jangka Panjang. Tingkat suku bunga menentukan nilai tambah mata uang suatu negara. Saat suku bunga rendah maka dana yang mengalir akan semakin banyak dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat, sebaliknya Ketika suku bunga tinggi maka sedikit dana mengalir ke Negara tersebut.

Suku bunga merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian suatu negara. Sebagai instrumen moneter suku bunga sangat mempengaruhi pasar uang baik dalam maupun luar negeri. Pergerakan suku bunga dapat mempengaruhi suatu negara dalam menstabilkan perekonomian negara. Jika suatu negara mengalami krisis pembayaran utang luar negeri salah satunya dengan cara kreditur memperpanjang masa jatuh tempo pembayaran tetapi suku bunga meningkat (Saleh, 2008).

Apabila utang digunakan secara tidak wajar maka kemungkinan utang tersebut akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi bahkan mengancam kestabilan makroekonomi negara. Beban utang luar negeri yang semakin besar membawa konsekuensi beban anggaran dengan pembayaran

pokok serta bunga utang ikut meningkat. pengembalian utang yang kecil menyebabkan ketergantungan terhadap utang semakin meningkat.

#### **2.8.4 Kaitan defisit anggaran, utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi**

utang luar negeri merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembiayaan pembangunan. Menurut Patria (Rieski prodeo patria, 2018) utang luar negeri digunakan untuk menutupi kesenjangan antara tabungan dan investasi, defisit transaksi berjalan, dan defisit anggaran pemerintah/APBN. Semakin banyak suatu negara bergantung kepada penanaman modal asing dan bantuan luar negeri, maka semakin berkurang pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Semakin banyak negara bergantung kepada penanaman modal asing dan bantuan luar negeri, semakin besar perbedaan penghasilan dan pemerataan ekonomi tidak tercapai (Niken Paramita purwanto, 2011). Bantuan luar negeri justru menghasilkan dampak pengganda (multiplier effects) yang positif pada perekonomian, pinjaman luar negeri dalam jangka pendek dapat menutup defisit APBN, sehingga memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan dukungan modal yang relatif lebih besar, tanpa disertai efek peningkatan tingkat harga umum. Dengan demikian pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal untuk mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, langkah pemerintah dalam memenuhi defisit anggaran APBN dengan melalui utang pemerintah. Sebagian besar negara berkembang di dunia memanfaatkan utang luar negeri untuk menyokong proses pembangunan mereka, meskipun terdapat banyak negara

yang justru terjebak di dalam perangkap utang luar negeri, di mana hal tersebut menimbulkan defisit dalam anggaran lalu akan ditutupi dengan pinjaman luar negeri, sehingga utang luar negeri akan terus meningkat (Nur et al., 2017). faktor spesifik yang menyebabkan defisit anggaran di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Terjadinya defisit ini juga bisa ditutupi dengan meminjam dari luar negeri baik dalam bentuk bantuan maupun dalam bentuk utang yakni utang Luar Negeri (ULN).

## **BAB III**

### **KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **3.1 Kerangka Konseptual**

Indonesia sebagai salah satu negara yang melakukan pinjaman luar negeri, mengalami masalah apabila ada gejolak nilai tukar setiap tahunnya. Masalah ini disebabkan karena nilai pinjaman dihitung dengan valuta asing, sedangkan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman dihitung dengan rupiah. Hubungan suku bunga dengan defisit anggaran secara langsung, dapat dilihat melalui pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), baik melalui Surat Utang Negara (SUN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dimana pembayaran bunga dan pokoknya dijamin oleh negara sesuai masa berlakunya. Apabila suku bunga naik, maka beban pembayaran bunga dan pokoknya terhadap SBN yang diterbitkan akan meningkat. Dengan demikian, melonjaknya pembayaran utang luar negeri akan meningkatkan defisit anggaran negara.

Ada pun tahap-tahap yang dilewati suatu negara dalam pertumbuhan ekonomi menurut Teori Rostow menjelaskan bahwa ada tahap-tahap yang dilewati suatu negara dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu tahap tersebut yaitu suatu negara bisa tinggal landas jika tidak lagi tergantung kepada utang luar negeri. Namun disisi lain, utang luar negeri merupakan salah satu sumber modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembayaran kembali utang luar negeri dan bunganya meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah akumulasi utang luar negeri, sehingga membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). utang yang dilakukan

pemerintah dalam membiayai belanja pemerintah secara teori dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baik dari sisi permintaan [ $Y=C+I+G+NX$ ] maupun dari sisi Penawaran [ $Y= F(K,L)$ ], namun utang pemerintah juga dapat menimbulkan beban utang yang akan membebani anggaran pemerintah dan pada akhirnya justru menghambat pertumbuhan ekonomi. Beban utang pada akhirnya memperburuk kondisi masyarakat. Pembayaran utang luar negeri melalui pertukaran dolar dan langsung menentukan pengaruh belanja pemerintah, nilai tukar dolar, dan utang luar negeri tahun sebelumnya terhadap utang luar negeri pemerintah. penelitian Hariyati (2012) yang menyatakan anggaran belanja berpengaruh terhadap utang pemerintah, semakin tinggi anggaran belanja maka semakin tinggi pula utang. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil yang diperoleh, penelitian ini merekomendasikan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa utang luar negeri dan pengeluaran pemerintah dikelola dengan baik untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Pratiwi (2015) mengatakan bahwa tingkat suku bunga adalah beban biaya yang dinyatakan dengan presentase tertentu dalam rangka peminjaman uang untuk jangka waktu tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam penelitian Fitria (2018) merupakan harga dari penggunaan uang yang dinyatakan dalam persen untuk jangka waktu tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas menunjukkan hasil yang tidak konsisten dengan kesimpulan yang berbeda-beda.

Teori Harrod-Domar yang menyebutkan bahwa semakin banyak porsi PDB yang ditabung akan menambah capital stock sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut tentu tidak menguntungkan. Hal ini karena sebagian besar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian ternyata tersedot oleh pengeluaran rutin yang sebagian besar teralokasi pada cicilan pokok dan bunga utang. Utang yang sasaran utamanya untuk menunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi beban pemerintah saat melakukan pembayaran utang tersebut. Pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri berpengaruh terhadap perekonomian karena pada kondisi tertentu pembayaran cicilan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian sehingga menghilangkan kontribusi positif dari utang luar negeri (Junaedi & Salistia, 2019).

Apabila nilai tukar atau kurs terdepresiasi maka utang luar negeri yang harus dibayar juga akan semakin meningkat (Nazir, 1988). Untuk mengurangi beban utang luar negeri di masa mendatang pemerintah harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat membiayai belanja pemerintah dan menghentikan kebijakan menutup utang lama dengan utang baru, utang luar negeri yang diambil dapat digunakan dengan produktif agar dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. penelitian Malik (2017), Rachmadi (2013) utang luar negeri merupakan variabel yang bisa saja mendorong perekonomian sekaligus menghambat pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa utang luar negeri berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

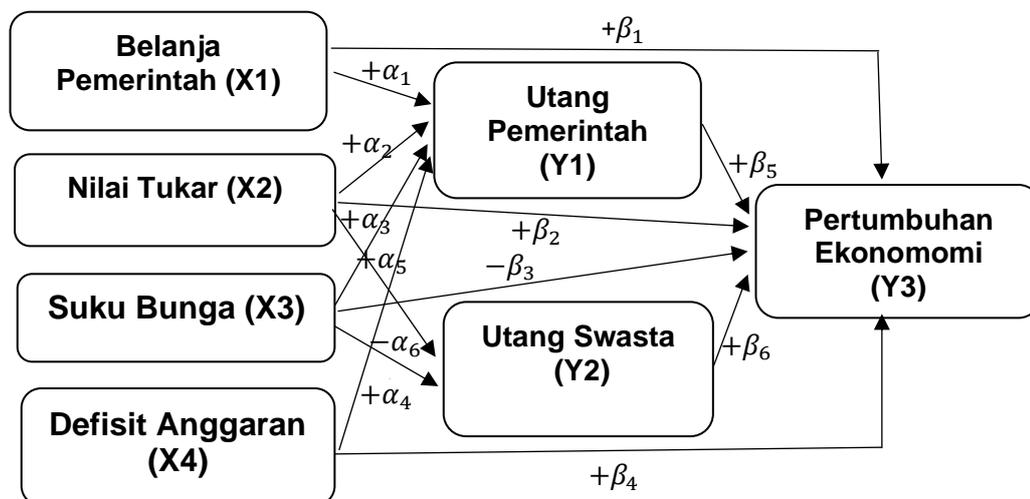
Perlu juga dipaparkan, terjadinya defisit anggaran diakibatkan oleh beberapa faktor penting: adakalanya ia terjadi karena anggaran yang memang kurang, dan adakalanya pula cara atau metode pembiayaan yang mengakibatkan defisit. Defisit berarti, pemerintah mengkonsumsi lebih dari jumlah pendapatannya yang kemudian biaya kekurangannya itu diambilkan dari pendapatan individu. Ini artinya, total permintaan terhadap barang dan jasa berlebih jika dibandingkan dengan total penawaran. Pengertian ini dengan asumsi bahwa masyarakat terhalangi dari perdagangan luar negeri yang menyebabkan seluruh konsumsi individu harus ditekan untuk memberi ruang bagi konsumsi pemerintah yang berlebih (Satrio, 2015). Semakin tinggi pendapatan nasional disuatu negara akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mengurangi utang luar negeri. Pengeluaran pemerintah adalah belanja negara atas pembayaran barang dan jasa untuk kepentingan suatu negara. Semakin besar pengeluaran pemerintah di suatu negara maka akan meningkatkan utang luar negeri.

Pandangan Keynes-Klasik. Pandangan mainstream ekonomi (Klasik maupun Keynesian) menyatakan bahwa tidak pernah ada bicara tentang pembiayaan tetapi yang ada hanya membicarakan expenditure yang setidaknya akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian. Pandangan Keynesian memposisikan pada government expenditure, di mana pada kondisi krisis, maka defisit diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Modal asing khususnya utang luar negeri, secara faktual ditempatkan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan, meskipun secara normatif harus ditempatkan sebagai sumber tambahan. Kenyataan inilah yang menyebabkan bahaya tersembunyi, melekat pada pola pembangunan yang didorong modal asing. Apabila posisi

ketergantungan semakin besar, semakin besar pula risiko terkait yang harus dihadapi oleh sistem ekonomi global dalam bentuk ketergantungan terhadap modal asing, khususnya utang luar negeri.

Utang luar negeri dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kenaikan utang luar negeri dalam waktu tertentu dapat menaikkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penelitian didapatkan hasil bahwa utang luar negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Malik, 2017). Kenaikan pengeluaran konsumen ini juga menyebabkan permintaan agregat yang lebih besar dan pendapatan yang lebih tinggi dalam jangka pendek, tetapi hal itu juga menyebabkan persediaan modal yang lebih kecil dan pendapatan yang lebih rendah, sehingga utang luar negeri akan lebih besar dalam jangka panjang (Mankiw, 2007)

Adapun kerangka konseptual penelitian digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konseptual Penelitian**

### 3.2 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara langsung dan tidak langsung melalui utang pemerintah dan utang swasta.
2. Diduga nilai tukar berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara langsung dan tidak langsung melalui utang pemerintah dan utang swasta
3. Diduga suku bunga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara langsung dan tidak langsung melalui utang pemerintah dan utang swasta.
4. Diduga defisit anggaran berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui utang pemerintah dan utang swasta.